



GUBERNUR PASTIKAN Pengerjaan Sungai Selor Rampung 2024

BACA HALAMAN 2-3



PELAKU PENGHELAPAN MOBIL RENTAL DIRINGKUS 1 ORANG MASUK DPO

BACA HALAMAN 10



PASTIKAN RAMPUNG: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang di atas excavator amphi long arm buatan PT. Pindad saat sedang melakukan pengerukan Sungai Selor di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (21/8).

Gubernur Pastikan Pengerjaan Sungai Selor Rampung 2024 Mendatang

TANJUNGSOLOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, meninjau langsung pengerukan Sungai Selor di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Tahun ini, proyek normalisasi sun-

gai itu akan menghabiskan dana Rp 5 miliar. Pekerjaan tahap pertama akan tuntas pada akhir tahun ini. Kemudian akan dilanjutkan tahap dua pada 2024 mendatang.

“Sudah mulai dikerjakan. Tahap

pertama akan selesai akhir tahun ini. Akhir 2024 selesai,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang di Tanjung Selor, Senin (21/8/2023).

Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah melakukan penandatanganan MoU Kerjasama tentang Pelaksanaan Normalisasi Sungai Selor/Buaya Kabupaten Bulungan oleh Gubernur Kaltara dan Komandan Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen TNI Ari Estefanus, S.Sos.,M.Sc, pada bulan Juli lalu.

Pengerukan dan pembersihan sungai dari tanaman liar itu dimaksudkan untuk mengembalikan fungsinya ke semula, yaitu jalur transportasi masyarakat dan sumber air baku perusahaan air minum milik Pemerin-

tah Daerah.

Gubernur mengungkapkan dalam pengerjaan normalisasi sungai tersebut, DPUPR – Perkim mulai dari Meranti hingga Intake Sungai Buaya, sedangkan Korem dari Kampung Arab hingga Meranti.

Pengerjaan proyek ini menggunakan excavator buatan dalam negeri yaitu Excavator Amphibi Long Arm Pindad. Ia mengatakan excavator itu baru sebulan dibeli dari PT. Pindad. Pertimbangannya pembelian ini karena adanya nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN merupakan menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.

“Kita harapkan Sungai Selor kembali ke fungsi semula serta bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Gubernur. (dkisp)





Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya

Ketua DPRD Kaltara Sambut Positif Sosialisasi KPK soal Pencegahan Korupsi

TANJUNGSALOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah Kaltara, berkaitan dengan program Pemberantasan korupsi di Gedung Gadis, Jalan Rambutan Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (22/8/2023).

Sosialisasi ini, melibatkan seluruh stakeholder terkait baik di tingkat Provinsi hingga Kabupaten dan Kota se-Kaltara. Dikonfirmasi mengenai kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya menyambut dengan positif kegiatan sosialisasi hari ini.

Bahwa, dari sisi pengawasan KPK telah melibatkan seluruh Stakeholder terkait di Wilayah Kaltara. Mulai dari tingkat Provinsi, hingga Kabupaten dan Kota termasuk di lembaga DPRD serta stakeholder terkait lainnya.

“Sosialisasi yang dilakukan, berkaitan dengan konsentrasi KPK dalam 8 bidang. Yang merupakan amanah serta bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI,” ujar Albert.

Termasuk pada pemetaan potensi serta sumber terjadinya praktek korupsi. “Ruang-ruang inilah yang menjadi sebuah konsentrasi kita termasuk DPRD Kaltara. Untuk segera

melakukan antisipasi atau pencegahan sejak dini, terhadap segala hal yang berpotensi terjadi adanya kasus korupsi,” tukasnya.

Sehingga, ketika ada indikasi terjadinya kasus penyelewengan anggaran, kata dia sebisa mungkin dilakukan pencegahan atau deteksi dini. Kemudian, bisa menjadi informasi penting hingga menjadi kekuatan dan acuan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

BUPATI BULUNGAN: membenarkan usulan pemerintah daerah soal formasi CPNS tahun 2023.

Penerimaan CASN 2023, Pemkab Bulungan Usulkan 332 Formasi

TANJUNGSER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, pada tahun 2023 mengusulkan sebanyak 332 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Usulan itu berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulungan, Nurdiana membenarkan hal tersebut.

"Iya betul, tahun ini kita usulkan, jumlahnya sebanyak 332 formasi," ujar Nurdiana, saat dikonfirmasi melalui singkat WhatsApp, Selasa (22/8/2023).

Sebagai informasi, Pelaksanaan tahapan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023, secara serentak akan dimulai pada September 2023 mendatang. Hal itu, mengacu pada surat BKN Nomor :7948/B-KS.04.01/SD/K/2023. Sementara, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) 31 Oktober

hingga 9 November 2023.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menambahkan, usulan itu sudah sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. "Iya, itu sudah sesuai dengan usulan kita," jelas Syarwani.

Berkaitan dengan adanya skala prioritas untuk kebutuhan di daerah, kata Bupati itu difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Jumlahnya masing-masing ratusan, ditambah dengan kebutuhan tenaga teknis lainnya.

Oleh karena itu, dimungkinkan untuk pengangkatan honorer ditiadakan. Sebagaimana edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, meskipun daerah belum mendapatkan edaran itu secara resmi. "Sekalipun ada pengisian, teknisnya melalui mekanisme formasi PPK," katanya.

Secara terpisah, ketua DPRD Bulungan Kilat menuturkan perekrutan CASN untuk Kabupaten Bulun-

gan mestinya diprioritaskan pada putra dan putri daerah. Selain itu, juga diperhatikan dari sisi komposisi, kualitas dan skala prioritas.

"Kalau kita menyarankan perhatian pada aspek prioritas pemerintah daerah. Karena, secara prosedur penambahan perekrutan CASN untuk memudahkan kerja pemerintah dalam melayani masyarakat," bebernya.

Mengenai peniadaan tenaga honorer bagi daerah, kata politisi Gerindra ini harus betul dikaji asas manfaat. Atau mungkin ada regulasi lain soal pengangkatan tenaga honorer menjadi PPK. Sehingga tidak terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada naiknya angka pengangguran. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



HUMAS PEMKAB BULUNGAN

Bupati Bulungan Syarwani, saat melakukan penandatanganan komitmen memberantas korupsi.

Pemkab Bulungan Siap Benahi Atensi KPK RI

TANJUNG SELOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), melangsungkan sosialisasi berkaitan dengan Pemberantasan korupsi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Dihadirkan langsung oleh Kepala daerah masing-masing Kabupaten dan Kota se-Kaltara. Bupati Bulungan Syarwani, saat dikonfirmasi menuturkan ada tindak lanjut

setelah ada sosialisasi dari KPK. Dari 8 area yang menjadi titik fokus KPK, didalamnya masih ada hal yang masih di benahi oleh Pemkab Bulungan.

Hal itu yang menjadi komitmen dan dirapatkan, sehingga besok KPK secara khusus dengan Pemkab Bulungan akan melangsungkan rapat lebih lanjut, terkait 8 area yang masih akan perlu dibenahi. "Dari 8 area

yang disebutkan tadi, masih ada hal penting yang perlu kita tingkat optimalkan," ucap Syarwani.

Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bupati mengimbau bahwa apa yang menjadi indikator dan standar yang telah ditetapkan dalam Monitoring Center For Prevention (MCP).



Adapun 8 area yang menjadi titik fokus dan standar KPK RI di antaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN,

Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Bupati memastikan, itu dapat terkejar dengan sisa waktu yang ada. "Insyallah, kita yakin dan optimis meskipun ada yang masih kita perlu

benahi, dan memang belum semuanya sempurna masih ada yang perlu dibenahi. Ada hal yang kurang kita perbaiki," pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika





KALTARA DIHATI: Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si berfoto bersama usai pembukaan Bimtek Satlinmas Tahun 2023 di Hotel Crown Tanjung Selor, Selasa (22/8).

Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Satlinmas

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Bulungan Tahun 2023.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka bimtek dengan tema “Wujudkan Satlinmas Siaga Bencana dan Siap Sukseskan Semilu Tahun 2024”.

Sebanyak 32 peserta dari unsur satlinmas Kabupaten Bulungan menghadiri Bimtek tersebut. Turut hadir narasumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, IPDA Sayid Taha, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami, S.HI., M.H., dan dari Kementerian Dalam Negeri, Marta Dwi Rifka, S.IP., dilaksanakan selama 2 hari.

Datu Iqro mengungkapkan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan upaya yang

dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dan gangguan yang diakibatkan oleh bencana.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

“Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) berada di kelurahan dan kantor desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melindungi masyarakat,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro berharap Satlinmas dapat membantu keamanan bersama pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang terus berkembang hingga sekarang. Misalnya melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan.

Selain itu, Satlinmas juga memiliki peran penting dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun depan secara serentak.

Suksesnya pesta demokrasi terse-

but, kata Datu Iqro meliputi ketertarikan yang terus terjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. Kemudian, menjaga keamanan TPS barang-barang kebutuhan Pemilu serta membantu aparat penyelenggara dalam mengamankan dan menentukan pelaksanaan pemilu.

“Saya mengingatkan kepada kepala Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan agar benar-benar memperhatikan eksistensi keberadaan Satlinmas di Kalimantan Utara juga termasuk pembentukan dan pemetaan Satlinmas di tingkat desa kelurahan kecamatan kabupaten kota dan provinsi,” tuturnya.

Datu Iqro juga berharap kegiatan ini menghasilkan output yang jelas, terukur dan membumi, dalam suasana damai, tertib dan tentram. Pasalnya diperlukan masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan visinya yaitu Berubah, Maju dan Sejahtera. (dkisp)



ENTRY MEETING : Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP menerima kunjungan BPK RI Perwakilan Kaltara, dalam rangka Entry Meeting di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/8).

Harapkan Perangkat Daerah Mampu Bekerjasama

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., menerima Wakil Penanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Surya Hadi Saputra beserta jajarannya yang berjumlah 8 orang dalam rangka Entry Meeting di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/8).

Sekprov Suriansyah dalam sambutannya berharap kepada perangkat daerah untuk tetap mentaati dan menindaklanjuti semua yang disampaikan.

“Saya harap kepada seluruh pejabat di perangkat daerah masing-masing dapat bekerjasama,” kata Sekprov, Dalam pertemuan tersebut juga Surya Hadi juga memperkenalkan jajarannya yang ikut dalam pelaksa-

naan tugasnya. Tak lupa ia menyerahkan Surat Tugas kepada Sekprov Suriansyah untuk memulai kegiatan BPK di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Kepada kawan – kawan semua saya ingatkan sekali lagi untuk dapat kooperatif terhadap kinerja BPK RI,” tegasnya. Pasaunya, waktu pemeriksaan yang cukup terbatas hingga 26 hari. (dkisp)



Polres Berau merilis kasus penipuan dan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kabupaten Berau.

Pelaku Penggelapan Mobil Rental Diringkus 1 Orang Masuk DPO

TANJUNG REDEB - Polres Berau membekuk pelaku sindikat penggelapan mobil rental di Kabupaten Berau. Dari 3 tersangka, satu orang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Masing-masing berinisial MY, MS dan S. Mereka berhasil membawa kabur dua kendaraan roda empat.

Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo membeberkan, pengungkapan sindikat penggelapan mobil rental tersebut diketahui setelah adanya laporan dari salah satu pemilik jasa rental mobil yang mengaku mobil miliknya tak kunjung kembali setelah disewa oleh pelaku yang tidak bisa dihubungi. Dari laporan itulah, polisi langsung bergerak dan menangkap para pelaku.

Kejadian tersebut dilaporkan korban pada 14 Agustus lalu. Tersangka MY melakukan modus menyewa mobil rental milik korban pada 4 Agustus. MY mengelabui korban dengan memberikan KTP palsu. Pelaku juga

memberikan uang muka sebesar Rp 1,5 juta untuk membuat pemilik mobil percaya melepaskan mobilnya untuk disewa oleh pelaku.

Kemudian langsung dibawa kabur tanpa sepengetahuan pemilik dan dibawa ke Samarinda untuk dipindahtangankan. "Setelah berhasil mendapatkan satu mobil, tersangka mencari mobil lain untuk digelapkan dengan modus yang sama pada 8 Agustus," jelasnya, Selasa (22/8/2023).

Menurut pengakuan pelaku sendiri, Dia memperoleh keuntungan sebesar Rp 14 Juta, namun baru dibayarkan Rp 3 Juta.

Diceritakannya, tersangka sendiri berhasil dibekuk di Gang Dimas Jalan Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb. Satu tersangka lainnya MS berhasil dibekuk Polres Samarinda. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain berinisial S.

"Pelaku MS sebagai penerima di Samarinda dan mencari pembeli

mobil hasil dari modus rental di Berau untuk di jual di sana," terangnya.

Selain membekuk pelaku, Polres Berau juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 2 unit mobil, 1 buah ponsel, 3 KTP palsu, dan 1 STNK.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 372 KUHPidana dan 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Sejauh ini, kata Dia, baru dua orang yang melaporkan ke Polres terkait penggelapan mobil rental tersebut. Pihaknya mengimbau kepada semua pemilik rental di Berau agar tetap berhati-hati dan mengkonfirmasi identitas penyewa dengan jelas.

"Modus seperti ini sering terjadi, harap selalu berhati-hati. Jangan sampai ini terulang lagi di Berau," imbaunya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwana



**MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP
HOTEL GRAND KARTIKA SAMARINDA**

PERKUAT KERJASAMA DENGAN MEDIA

BACA HALAMAN 17-18

Koran DIGITAL



RABU, 23 AGUSTUS 2023



**TERVERIFIKASI
DEWANPERS**

PASANG IKLAN HUBUNGI

0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



DAMPAK KEMARAU, TERANCAM GAGAL PANEN

BACA HALAMAN 2



Agus Basuki saat menunjukkan pohon buah yang mulai mengering akibat kurangnya air.

Dampak Kemarau, Petani Buah Terancam Gagal Panen

BALIKPAPAN - Musim kemarau dan cuaca panas yang melanda Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Timur dan Balikpapan khususnya kini mulai dirasakan dampaknya.

Ketua Kelompok Tani Karang Joang, Balikpapan Utara, Agus Basuki mengatakan, sejak tidak ada turun hujan di kawasan Balikpapan Utara dalam kurun waktu beberapa minggu ini, kondisi tanaman buah-buahan yang ada di lahannya mulai mengering dan layu.

"Sudah kering daunnya dan buahnya juga enggak berkembang dengan maksimal," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut Agus menjelsakan,

dari luasan 4 hektar lahan yang dimilikinya, saat ini sekitar 2 hektar lahan untuk tanaman baru tumbuh juga mengalami kekeringan. "Sudah kita siramin, tapi ketersediaan air kita enggak cukup lagi sudah," jelasnya.

Agus mengaku, jauh hari sebelum memasuki musim kemarau dirinya telah menyiapkan sumber-sumber air. Hanya saja karena sudah lama tidak ada hujan maka sumber airnya pun mulai mengering juga.

"Di sini kita siapkan 3 sumber air, tapi karena kita siram seminggu 3 kali dan enggak ada hujan makanya mulai habis juga," tambah Agus Basuki.

Di lahannya saat ini terdapat buah

pepaya mini, kacang panjang, tomat dan buncis. Namun karena dampak kemarau, seluruh pohonnya telah mengalami kekeringan termasuk tanah yang mengeras. "Karena kan ini tanamannya butuh air banyak semua," ujarnya lagi.

Agus berharap, dalam beberapa hari ke depan hujan bisa turun di Kota Balikpapan khususnya di wilayah Karang Joang Km 12. "Ya kalau memang masih enggak ada hujan, tanaman yang baru tumbuh bisa mati dan yang berbuah gagal panen," tutupnya. (bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Dapatkan diskon 25% pada liburan Anda berikutnya di Asia Pasifik. Anggota Accor Plus menikmati diskon tambahan 10%. Pesan sebelum 21 Agustus untuk menginap hingga 30 November 2023.

*Menginap minimal 2 malam. Syarat & ketentuan berlaku.





ENTRY MEETING : Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP menerima kunjungan BPK RI Perwakilan Kaltara, dalam rangka Entry Meeting di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/8).

Harapkan Perangkat Daerah Mampu Bekerjasama

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., menerima Wakil Penanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Surya Hadi Saputra beserta jajarannya yang berjumlah 8 orang dalam rangka Entry Meeting di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Kaltara, Senin (21/8).

Sekprov Suriansyah dalam sambutannya berharap kepada perangkat daerah untuk tetap mentaati dan menindaklanjuti semua yang disampaikan.

“Saya harap kepada seluruh pejabat di perangkat daerah masing-masing dapat bekerjasama,” kata Sekprov. Dalam pertemuan tersebut juga Surya Hadi juga memperkenalkan jajarannya yang ikut dalam pelaksa-

naan tugasnya. Tak lupa ia menyerahkan Surat Tugas kepada Sekprov Suriansyah untuk memulai kegiatan BPK di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Kepada kawan – kawan semua saya ingatkan sekali lagi untuk dapat kooperatif terhadap kinerja BPK RI,” tegasnya. Pasaunya, waktu pemeriksaan yang cukup terbatas hingga 26 hari. **(dkisp)**



KALTARA DIHATI: Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si berfoto bersama usai pembukaan Bimtek Satlinmas Tahun 2023 di Hotel Crown Tanjung Selor, Selasa (22/8).

Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Satlinmas

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Bulungan Tahun 2023.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka bimtek dengan tema “Wujudkan Satlinmas Siaga Bencana dan Siap Sukseskan Semilu Tahun 2024”.

Sebanyak 32 peserta dari unsur satlinmas Kabupaten Bulungan menghadiri Bimtek tersebut. Turut hadir narasumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, IPDA Sayid Taha, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami, S.HI., M.H., dan dari Kementerian Dalam Negeri, Marta Dwi Rifka, S.IP., dilaksanakan selama 2 hari.

Datu Iqro mengungkapkan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan upaya yang

dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dan gangguan yang diakibatkan oleh bencana.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

“Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) berada di kelurahan dan kantor desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melindungi masyarakat,” kata Datu Iqro.

Datu Iqro berharap Satlinmas dapat membantu keamanan bersama pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang terus berkembang hingga sekarang. Misalnya melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan.

Selain itu, Satlinmas juga memiliki peran penting dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun depan secara serentak.

Suksesnya pesta demokrasi terse-

but, kata Datu Iqro meliputi ketertarikan yang terus terjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. Kemudian, menjaga keamanan TPS barang-barang kebutuhan Pemilu serta membantu aparat penyelenggara dalam mengamankan dan menentukan pelaksanaan pemilu.

“Saya mengingatkan kepada kepala Satpol PP provinsi maupun kabupaten/kota sebagai perangkat daerah yang melakukan pembinaan agar benar-benar memperhatikan eksistensi keberadaan Satlinmas di Kalimantan Utara juga termasuk pembentukan dan pemetaan Satlinmas di tingkat desakelurahankecamatan kabupaten kota dan provinsi,” tuturnya.

Datu Iqro juga berharap kegiatan ini menghasilkan output yang jelas, terukur dan membumi, dalam suasana damai, tertib dan tentram. Pasalnya diperlukan masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mewujudkan visinya yaitu Berubah, Maju dan Sejahtera. (dkisp)



PASTIKAN RAMPUNG: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang di atas excavator amphi long arm buatan PT. Pindad saat sedang melakukan pengerukan Sungai Selor di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (21/8).

Soal Sungai Selor, Gubernur Kaltara Pastikan Pengerjaan Rampung 2024 Mendatang

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, meninjau langsung pengerukan Sungai Selor di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Tahun ini, proyek normalisasi sungai itu akan menghabiskan dana Rp 5 miliar. Pekerjaan tahap pertama akan tuntas pada akhir tahun ini. Kemudian akan dilanjutkan tahap dua pada 2024 mendatang.

“Sudah mulai dikerjakan. Tahap pertama akan selesai akhir tahun ini. Akhir 2024 selesai,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang di Tanjung Selor, Senin (21/8/2023).

Sebelumnya, Pemprov Kaltara telah melakukan penandatanganan MoU kerjasama tentang Pelaksanaan Normalisasi Sungai Selor/

Buaya Kabupaten Bulungan oleh Gubernur Kaltara dan Komandan Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen TNI Ari Estefanus, S.Sos., M.Sc, pada bulan Juli lalu.

Pengerukan dan pembersihan sungai dari tanaman liar itu dimaksudkan untuk mengembalikan fungsinya ke semula, yaitu jalur transportasi masyarakat dan sumber air baku perusahaan air minum milik Pemerintah Daerah.

Gubernur mengungkapkan dalam pengerjaan normalisasi sungai tersebut, DPUPR –Perkim mulai dari Meranti hingga Intake Sungai Buaya, sedangkan Korem dari Kampung Arab hingga Meranti.

Pengerjaan proyek ini menggunakan excavator buatan dalam neg-

eri yaitu Excavator Amphibi Long Arm Pindad. Ia mengatakan excavator itu baru sebulan dibeli dari PT. Pindad. Pertimbangannya pembelian ini karena adanya nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. TKDN merupakan menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan.

“Kita harapkan Sungai Selor kembali ke fungsi semula serta bermanfaat untuk masyarakat,” tutup Gubernur. **(dkisp)**



YAHYA/ISTIMEWA/MEDIA KALTIM

Pelaksanaan penilaian dan visitasi dari komisi informasi Kaltim.

Delapan OPD Bontang Masuk Final Lomba Keterbukaan Informasi

BONTANG – Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bontang mengikuti lomba monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi antar OPD dan Kelurahan. Pelaksanaan penilaian pun dilakukan pada 21-22 Agustus 2023 yang akan dikunjungi langsung oleh Komisi Informasi Kaltim.

Dari 20 OPD yang mengikuti lomba keterbukaan informasi, ada sebanyak 8 OPD yang berhasil masuk dalam finalisasi penilaian keterbukaan

informasi.

Di antaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Belimbing, Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Satimpo.

Kedelapan OPD tersebut telah melalui hasil verifikasi dokumen Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan telah disampaikan pada PPID

Utama Kota Bontang dan akan dinilai langsung oleh Komisi Informasi Kalimantan Timur pada Senin-Selasa (21-22/8/2023).

Untuk penilaian sendiri, masing-masing OPD akan mempresentasikan keterbukaan informasi pada saat visitasi Komisi Informasi Kalimantan Timur. (adv/yah)

Pewarta : Yahya

Editor : Nicha Ratnasari



YUSVA ALAM

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal usulkan penangkaran buaya.

Usulan Penangkaran Buaya Sulit Direalisasikan, Wali Kota: Kita Terbentur Aturan

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyarankan agar dibangun sebuah penangkaran buaya di Bontang. Hal ini sebagai solusi mengatasi banyaknya kasus buaya yang muncul ke pemukiman warga beberapa tahun belakangan ini.

Hal itu diungkapkan Faisal saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, kondisi habitat buaya saat ini dan dahulu jauh berbeda. Saat ini dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan di Bontang, maka habitat buaya juga ikut tergeser. Alhasil, semakin banyak buaya yang keluar dari habitat-

nya untuk mencari mangsa.

Tentunya hal ini menjadi suatu permasalahan, lantaran kehadiran buaya di pemukiman warga akan mengganggu warga yang tinggal di lokasi tersebut. Bahkan seringkali terjadi penyeraman buaya kepada warga.

“Semoga Dinas Pariwisata bisa juga jadikan penangkaran buaya itu sebagai tempat wisata ke depannya. Biar Pak Ambo bisa kasih makan Buaya Riska dan jadi objek wisata pengunjung,” ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota Bontang bahwa usulan penangkaran buaya juga pernah diajukannya sewaktu dirinya menjadi Anggota DPRD Bontang Komisi III. Namun usulan tersebut selalu tertolak, lantaran ada aturan yang mengatur terkait buaya.

“Kita terbentur aturan. Buaya ini

ranahnya BKSDA Kaltim. Kalau kita yang membuat penangkaran buaya itu justru kita bisa kena sanksi, karena buaya hewan yang dilindungi,” ucapnya.

Ia berharap dari OPD terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) bisa mengusulkan ke BKSDA Kaltim karena ada juga aturan terkait penangkaran buaya di sungai. “Kalau BKSDA yang minta bantuan ke kita barubisa kita bantu. Namun ranahnya tetap di BKSDA,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ide yang dahulu pernah ingin dilakukan adalah bukan penangkaran permanen melainkan, penampungan sementara atau tempat singgah bagi buaya. “Sementara saja. Jadi buayanya masuk di tempat singgah terus dilepas lagi ke alamnya,” pungkasnya. (adv/al)



ISTIMEWA

Kondisi Pasar Citra Mas, Loktuan saat ini.

Faisal: Parkiran Pasar Citra Mas Perlu Dibenahi!

BONTANG – Salahsatu sarana prasarana yang masih dirasa kurang di Pasar Citra Mas Loktuan adalah parkiran. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakan Faisal, saat ini kondisi parkiran Pasar Citra Mas belum terlalu bagus dan tidak terlihat rapi, sehingga perlu diperhatikan untuk diperbaikannya.

Ditambah lagi luas parkiran masih

dirasa minim. Menyebabkan banyak kendaraan baik pengunjung maupun pedagang yang terparkir semrawut. Sehingga lalu lintas kendaraan yang akan keluar masuk pasar menjadi terhambat.

“Kondisi ini perlu diperhatikan pak wali, agar pengunjung yang ingin mencari kebutuhan di Pasar Citra Mas semakin bersemangat berbelanja,” ujarnya.

Sementara ini status lahan parkir Pasar Citra Mas, pemerintah masih menggunakan lahan KIE dengan sistem pinjam pakai. Waktunya pun hanya berlangsung selama setahun.

Menjawab masukkan tersebut,

Wali Kota Bontang mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP). Ia akan meminta DKUKMP untuk melengkapi dan membenahi kekurangan yang ada pada parkiran pasar.

Menurutnya, tak hanya parkiran di Pasar Citra Mas yang butuh pembenahan. Masih banyak sisi lainnya yang butuh dibenahi, seperti talang, WC, dan lain sebagainya.

“Semoga di perubahan nanti DKUKMP sudah memasukkan usulan itu. Nanti saya akan koordinasikan,” pungkasnya. (adv/al)

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim | mediakaltimdotcom | mediakaltim.com | media kaltim



ISTIMEWA

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris saat meninjau lokasi sekolah bersama Pemkot Bontang.

Sapras Memprihatinkan, Pemkot Didesak Segera Relokasi SDN 007 Guntung

BONTANG - Kondisi sarana dan prasarana (sapras) di SDN 007 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Lantaran banyak sekali permasalahan yang membuat aktivitas belajar mengajar terganggu.

Beberapa permasalahan yang ada di sekolah ini di antaranya sebagian bangunannya masih menggunakan kayu, kondisi WC yang tidak layak, keterbatasan ruang kelas dan bau amoniak pabrik yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Serta sering menjadi daerah langganan banjir.

Selain itu diungkapkan Kepala Sekolah SDN 007 Guntung, Nurmiani ruang kelasnya terbatas, tidak punya pagar dan security, khususnya yang di bagian belakang sekolah.

"Kadang guru lepas pengawasan terhadap anak-anak. Hujan 10 menit langsung banjir. WC sangat tidak memadai kalau hujan airnya meluap dan jadi sarang ular," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Ditambahkan Nurmiani, bahwa sekolah ini terpaksa menerapkan pros-

es belajar mengajar harus secara bergiliran, lantaran kondisi ruang kelas yang terbatas. Sekolah merupakan satu-satunya sekolah yang menampung 18 RT di Kelurahan Guntung, mencapai 589 siswa.

"Kami berharap kepada pemerintah agar bisa dibuatkan sekolah yang lebih layak. Bau amoniak sangat menyengat dan mengganggu proses belajar mengajar. Banyak anak-anak tidak kuat sampai tidak masuk sekolah. Semoga bisa relokasi ke tempat yang lebih bagus," harapnya.

Sekretaris Daerah Aji Erlynawati menanggapi permasalahan itu dengan segera menindaklanjuti usulan itu, dan kemungkinan akan merelokasi sekolah.

"Memang fasilitasnya kurang representatif, baik WC, ruang UKS-nya, ruang belajar terbatas. Ditambah tengah-tengah sekolah ada rumah warga, juga bau amoniak yang cukup mengganggu. Mungkin memang solusinya akan kita lakukan relokasi," ujarnya saat meninjau sekolah.

Namun begitu, sebelum merelokasi pihaknya tetap akan membuat

masterplan rencana pembangunan sekolah terlebih dahulu, yang lengkap dan detail sesuai standar sembari menyiapkan lahan.

"Rencananya tahun 2024 buat masterplan dulu. Tahun 2025 baru bisa proses pembangunan. Lokasi sudah pernah kami tinjau bersama Disdik, di dekat Rusunawa Guntung. Luas lahannya 1,5 hektare," bebernya.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris yang hadir dalam tinjauan lapangan tersebut, turut mendesak agar usulan tersebut bisa segera terealisasi. Paling tidak segera dibuat tahap perencanaan terkait relokasi sekolah tersebut

"Harus ditunjang sapras yang baik, agar mencapai pembelajaran yang baik. Maka itu saya mendesak pemerintah harus segera merealisasikan permintaan para guru-guru di sekolah ini, untuk segera mungkin buat masterplan secepatnya. Jadi 2025 bisa segera dibangun," imbuhnya. (adv/al)



ISTIMEWA

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking.

Pelaku UMKM Pemula Butuh Bantuan Modal

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking meminta Wali Kota Bontang agar lebih memperhatikan UMKM di Kota Taman, sebutan Kota Bontang. Lantaran meningkatnya perekonomian di Bontang salah satunya dipengaruhi kondisi UMKM nya.

Hal itu diungkapkan Raking saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Dikatakannya, saat ini APBD-P Bontang cukup besar mencapai Rp 2,6 Triliun. Karenanya ia meminta agar anggaran besar tersebut bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian Bontang. Setidaknya

bantuan dapat diberikan kepada para pelaku UMKM pemula.

Menurutnya, para pelaku UMKM pemula sangat membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya dalam hal permodalan. Lantaran, permodalan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

“Tolong betul-betul dimaksimalkan untuk bantuan modal UMKM. Agar ekonomi kerakyatan di Bontang bisa meningkat, paling tidak di semester terakhir di tahun 2023 ini, sehingga Bontang menghasilkan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang menanggapi masukkan tersebut dengan mengatakan bahwa pihaknya tak bosan-bosannya terus mensosialisasikan kepada pelaku UMKM, bahwa industri migas di Bontang ini

akan habis. Karenanya perlu transformasi agar tidak lagi berharap pada industri migas, namun beralih ke bidang lainnya seperti perdagangan.

“Kami terus sosialisasi ke masyarakat agar jangan lagi berpikir untuk mencari kerja, tapi mulai berpikir bagaimana menyediakan pekerjaan,” kata Basri.

Selain itu pihaknya juga sudah menjembatani para pelaku UMKM dengan perusahaan. Agar difasilitasi pelatihan-pelatihan hingga permodalan. Namun begitu menurutnya, upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.

“Sudah difasilitasi bantuan modal tapi masih begitu-begitu aja. Belum ada peningkatan UMKM,” pungkasnya. (adv/al)



ADY/RADAR KUKAR

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid.

Kemarau Panjang, Ketua DPRD Kukar Ingatkan Masyarakat Tidak Bakar Lahan Dulu

TENGGARONG - Kemarau berkepanjangan sebagai buntut dari fenomena El Nino, mengakibatkan sejumlah besar wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. Hal ini tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tapi juga turut meningkatkan potensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Di Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri, kasus karhutla meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Cuaca panas tanpa hujan yang melanda Kukar dalam tiga bulan ke belakang, mengakibatkan hutan gambut di Kukar rawan terbakar. Seperti yang terjadi di Desa Sabintulung (Kecamatan

Muara Kaman), Desa Bendang Raya (Kecamatan Tenggarong), Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan dan Kota Bangun.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau kebun terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan dapat memicu karhutla.

"Cuaca kita ini lumayan panas, hampir tiga bulan tidak ada hujan. Kalau kita lihat kondisi air Sungai Mahakam juga surut. Kondisinya ini rawan sekali, makanya saya imbau masyarakat kita jangan bakar-bakar lahan ataupun kebun," imbaunya.

Bahkan menurut pengamatannya, kondisi udara di Kukar juga sudah mengalami perubahan. Ia merasa udara di Kukar mulai berkabut dikarenakan asap dari karhutla. Sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan oleh semua pihak, agar karhutla di Kukar tidak semakin meluas dan berdampak lebih buruk.

"Unit pemadam kita ada, tapi dikhawatirkan kalau unitnya tidak bisa menjangkau terlalu jauh karena terbatas, seperti kebakaran lahan gambut tidak bisa truk masuk," pungkasnya. (adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Suasana rapat pansus terkait pajak dan retribusi daerah di DPRD Kukar.

DPRD Kukar Resmi Bentuk Pansus Pajak dan Retribusi, Upaya Peningkatan PAD Kukar

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sedang fokus membentuk Panitia Khusus (Pansus), terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kukar. Secara resmi dikomandoi langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kukar, Sopan Sopian.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar diundang. Di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kukar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPST) Kukar dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar.

Selain itu, turut diundang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (Perkim) Kukar, Dinas Pekerja Umum (PU) Kukar, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kukar, Dinas Pertanian dan Peternakan (DKP) Kukar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Selain melakukan pembahasan finalisasi soal pajak daerah dan retribusi, kegiatan ini juga sebagai mempererat silaturahmi dengan OPD-OPD terkait," ungkap Sopan Sopian.

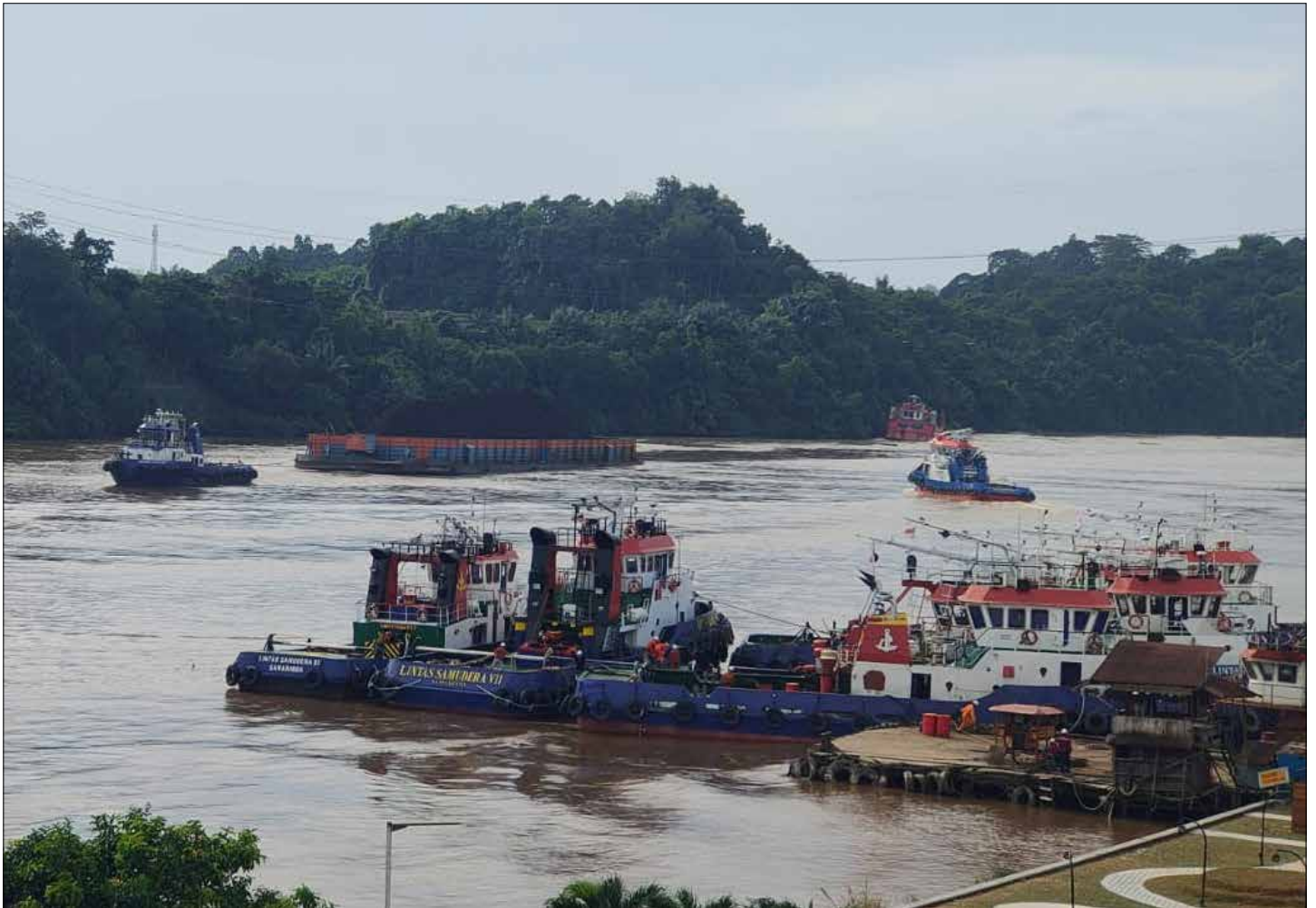
Pada kesempatan itu, Sopan Sopian juga turut mengapresiasi atas kehadiran seluruh OPD terkait dalam pembahasan finalisasi soal Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apalagi dalam hal ini pemerintah kabupaten mendapat kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan UU yang ada, terutama tentang cipta kerja.

"Alhamdulillah rapat Pansus berjalan dengan lancar, begitu pula soal pembahasannya. Hanya sedikit penambahan dan pergeseran pasca per pasal. Dalam waktu dekat ini juga akan kita lakukan sidang paripurna," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Kapal tugboat yang membawa ponton di Perairan Sungai Mahakam.

DPRD Kukar Soroti Aktivitas Pandu-Tunda di Perairan Muara Muntai

TENGGARONG - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sejumlah pihak. Membahas terkait pengaturan lalu lintas air, terutama untuk lalu lintas ponton di Kecamatan Muara Muntai. Atau lebih dikenal dengan aktivitas pandu-tunda, tepatnya di Desa Muara Muntai Ilir, belum lama ini.

Rapat dipimpin langsung oleh Sopan Sopian, didampingi Firnadi Ikhsan. Bersama perwakilan Polres Kukar, perwakilan Kodim 0906/Kukar, Camat Muara Muntai, BUMDes Muara Muntai Ilir, hingga perwakilan Pelindo.

"Membahas alur sungai (pandu-tunda) di Muara Muntai, akan diatur oleh pemerintah kabupaten melalui Tunggang Parangan," ungkap

Sopan Sopian, Selasa (22/8/2023).

Sejauh ini, memang baru alur lalu lintas di Jembatan Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun, yang sudah dikerjakan oleh Perusahaan Tunggang Parangan.

Dan saat ini, baru masyarakat sekitar yang mengelola secara mandiri secara swakelola. Maka itu perlu ada aturan yang mengatur, agar bisa dikelola sebaik-baiknya dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perusahaan daerah Tunggang Parangan.

Diketahui lokasi perairan Muara Muntai yang memiliki patahan sungai dianggap sangat membahayakan aktivitas nelayan setempat. Belum lagi bantaran perairan Muara Muntai

yang banyak ditempati oleh masyarakat. Ketika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.

Sopan memastikan akan kembali menggelar RDP serupa untuk membahas pemantapan terkait aturan aktivitas pandu-tunda di Kecamatan Muara Muntai. Tentunya dengan memanggil pihak terkait yang tidak hadir sebelumnya.

"Artinya bisa sama-sama manfaat bagi masyarakat dan pemkab, ada rasa aman, nyaman dan tertib," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) saat menggelar pelatihan membuat apotek hidup di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ganjar Milenial Bekali Masyarakat Paser Membuat Apotek Hidup

PASER - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) melanjutkan agenda positif untuk menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan membuat apotek hidup bersama mahasiswa yang ada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim).

Korwil GMC Kaltim I, Sadly Jaya M mengatakan, pelatihan itu diadakan di Desa Bente Tualan, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser, Kaltim.

"Kami menyasar para kepala desa, ketua RT, ibu-ibu PPK, hingga masyarakat setempat. Total ada puluhan peserta yang ikut," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Sadly menjelaskan, dalam kegiatan itu mereka berusaha untuk memperluas wilayah dalam menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai baca-

pres yang mereka dukung.

"Bersama dengan mahasiswa KKN Uinsi Samarinda, kami berkolaborasi melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif," jelasnya.

Salah satu yang menjadi fokus GMC adalah membudidayakan tumbuhan yang mudah ditemui menjadi suatu yang bermanfaat.

Sadly Jaya menambahkan, dalam pelatihan tersebut mereka juga turut menghadirkan pemateri yakni Supardanyang memaparkan tentang apotek hidup dan bercocoktanam yang sehat.

"Setelahnya dilakukan praktik bersama sembari menanam beberapa tanaman yang berjenis sayur dan obat-obatan yang diambil dari bahan dapur," ujar Sadly Jaya.

Menurut dia, kegiatan tersebut

mendapat sambutan positif dari warga maupun peserta yang hadir.

Sementara itu Jumaing, selaku Kepala Desa Bente Tualan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Ganjar Milenial Center (GMC) Kalimantan Timur. "Terima kasih telah hadir di desa ini, yang sangat luar biasa dan sangat sederhana ini," ujarnya.

Jumaing berharap semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan tidak hanya sebatas formalitas saja. "Namun, ada kesinambungan yang terjadi dan juga kepada ibu-ibu bisa merawat dengan baik agar bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat yang ada di sini," tutupnya. **(ADV/bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



**DANDIM CUP
KEJURPROV
SERI 3
2023**

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN
DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING
KETUA IMI KALTIM



**SAFETY
RIDING**



**LOMBA
DRAG BIKE**



**TALKSHOW
KEREN**



**LOMBA
MODERN DANCE**



**LIVE
MUSIC**



**LOMBA
17 AGUSTUS**



**LOMBA
FASHION SHOW**



**JALAN
SANTAI**



**KULINER
UMKM**

SAFETY RIDING & DRAG BIKE

**26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA**

JALAN SANTAI



**DOOR
PRIZE !!!**

**Disney+ hotstar
NETFLIX**



PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

**EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571**



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Dekat... tu Klik

GM GRAND KARTIKA HOTEL
ARMUNANTO SOMALINGGI

**DINAMIS &
FRIENDLY**



Media Kaltim Grup dan Hotel Grand Kartika Samarinda Perkuat Kerjasama Media

SAMARINDA - Media Kaltim Grup, yang dipimpin CEO Agus Susanto, bersama Direktur Media Kaltim Rini Ernawati dan Manager Area Samarinda, Adhi Abdhian, melanjutkan kunjungan partnership trip media ke Hotel Grand Kartika (GK).

Kunjungan ini memiliki makna khusus, mengingat GK adalah salah satu mitra pertama yang memasang iklan di Media Kaltim.

Meskipun saat ini tidak ada ikatan kontrak khusus, Media Kaltim tetap aktif memberitakan berbagai program promosi yang diadakan oleh hotel yang berlokasi di Jl. KH. Khalid No.35, Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota.

General Manager GK, Armunanto Somalinggi, yang akrab disapa Nanto, menyatakan bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

"Saya sudah lama mengenal Mas Adhi dan pernah bekerjasama dengannya. Ketika ada tawaran kerjasama dari Media Kaltim melalui Mas Adhi, saya langsung menerimanya," ungkap Nanto, Senin (21/10/2023).

Nanto, yang dikenal sebagai sosok penting dalam industri perhotelan di Samarinda, menilai bahwa media memiliki peran krusial dalam mendukung operasional GK. Oleh karena itu, ia aktif bekerjasama dengan

berbagai media, baik cetak, online, maupun elektronik.

Agus Susanto, CEO Media Kaltim, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh manajemen GK. "Kepercayaan dari GK menjadi pintu pembuka bagi kami untuk menjalin kerjasama dengan hotel-hotel lainnya," kata Agus.

Dalam kunjungan tersebut, Nanto juga diberikan kenang-kenangan berupa poster eksklusif cover Media Kaltim oleh Agus Susanto. (rs1)

*Pewarta: Adhi Abdhian
Editor: Agus Susanto*

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
J. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Rm. Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



ISTIMEWA

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya saat menyerahkan simbolis SIM kepada Penyandang tuna rungu.

Penyandang Tuna Rungu Sudah Bisa Dapat SIM, Begini Proses Mendapatkannya

BONTANG – Terhitung sejak Senin (21/8/2023), Sat Lantas Polres Bontang mulai menerbitkan SIM bagi penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli. Kebijakan ini diberlakukan secara serentak di wilayah Polda Kalimantan Timur.

“Para penyandang tuna rungu ini dalam memperoleh SIM tetap harus mengikuti proses yang ada. Seperti layaknya orang-orang pada umumnya,” ungkap Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya mengutip dari

situs Polresbontang.com.

“Total ada 19 anak penyandang tuna rungu yang mengurus SIM, yang lolos 6 orang,” ungkapnya.

Untuk mempermudah komunikasi, para petugas sudah mendapatkan pelatihan. Selain itu, para penyandang tuna rungu juga membawa pendamping.

Kapolres menjelaskan bagi mereka yang lolos akan diberikan stiker berupa gambar tidak bisa mendengar. “Ada dua stiker dipasang di helm dan

dasbor belakang motor. Kalau mobil di kaca belakang,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Bontang didampingi Kasat Lantas AKP M D Djauhari memberikan SIM secara simbolis kepada enam penyandang tuna rungu, yang dinyatakan telah lolos dan layak untuk mendapatkannya.

Editor: Yusva Alam



YAHYA/ISTIMEWA/MEDIA KALTIM

Lokasi kejadian kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo.

Korban Kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo Meninggal, Mengalami Luka Bakar 75 Persen

BONTANG – Korban kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, atas nama Budi Hartono dikabarkan meninggal dunia pada Senin (21/8/2023), di Rumah Sakit (RS) Samarinda pukul 19.00 Wita. Jenazah langsung dibawa menuju kediamannya di Kota Bontang.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Belimbing, Aipda Bambang Sumantri mengungkapkan kabar meninggalnya Budi Hartono didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh pihak Kelurahan Belimbing

“Untuk jenazah korban langsung dibawa dari RS Samarinda menuju kediaman rumah duka di BTN KCY, Kelurahan Api-api. Diketahui Korban mengalami luka bakar 75 persen dan sempat dirawat di RS PKT kemudian di rujuk ke RS Samarinda,” kata Aipda Bambang Sumantri.

Selain itu, Bambang mengatakan korban langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Api-api lantaran korban hanya menyewa tempat usaha di lokasi kebakaran tersebut.

“Sudah langsung dibawa ke rumah

duka di jalan Mawar BTN KCY. Untuk tempat kejadian kebakaran, korban menyewa sebagai tempat usaha,” ungkapnya.

Diinformasikan sebelumnya kebakaran di jalan Cipto Mangunkusumo yang terletak di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat terjadi pada Selasa (15/8/2023) lalu dengan korban atas nama Budi Hartono. (yah)

Pewarta : Yahya

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA/ISTIMEWA/MEDIA KALTIM

Pemberian penghargaan kepada RSUD Taman Husada.

Utamakan Keselamatan dan Keamanan Radiologi, RSUD Bontang Terima Penghargaan BAPETEN 2023

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 2023. Anugerah BAPETEN 2023 diberikan kepada 200 Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan (Yankes) seluruh Indonesia.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Kota Bontang, dr Suhardi menjelaskan bahwa penghargaan diberikan pada kategori anugerah yang diberikan nilai A pada fasilitas kesehatan dengan 'Keselamatan dan Keamanan pada Kegiatan Radiologi Diagnostik dan Intervensional'.

Lanjut Suhardi bahwa penilaian ini diberikan setelah mengevaluasi instalasi radiologi dan instalasi kateterisasi jantung di RSUD Taman Husada Bontang.

"Pemberian anugerah yang disampaikan secara online, tentunya memberikan kebanggaan bagi kami pihak RS dan masyarakat Bontang pada umumnya. Mengingat pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat tentunya harus mengutamakan keamanan dan keselamatan apalagi fasilitas terkait dalam kegiatan radiasi dan zat radioaktif," terang Direktur RSUD dr Suhardi, Selasa (22/8/2023) usai pemberian penghargaan secara daring.

Selanjutnya, dr Suhardi mengatakan RSUD Taman Husada Bontang berusaha menjamin dan menjaga mutu layanan kesehatan yang aman dan terbaik untuk masyarakat Bontang dan sekitarnya. "Penghargaan ini sebagai penyemangat kami dalam melayani masyarakat kota Bontang dan sekitarnya serta semakin lebih

baik dalam memberikan pelayanan yang aman baik untuk pasien maupun pemberi layanan kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan (Nakes)," ungkapnya.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada RSUD Bontang dengan instalasi kateterisasi jantung sebagai salah satu unit yang dinilai dari penghargaan BAPETEN, saat ini telah melayani pasien pengguna jaminan BPJS Kesehatan.

"Tentunya dengan adanya penghargaan ini akan semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap layanan unggulan yang kebetulan hanya ada satu-satunya di kota Bontang ini. RSUD akan terus melayani," pungkasnya. (yah)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Launching Kampung Bebas Narkoba di Kantor Lurah Gunung Panjang, Selasa (22/8/2023).

Kelurahan Gunung Panjang Deklarasi Kampung Bebas Narkoba

TANJUNG REDEB - Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb ditetapkan sebagai Kampung Bebas Narkoba oleh Polres Berau. Sebagai komitmen bersama memerangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih sangat menyambut baik gerakan positif tersebut. Dikatakannya, Kampung Bebas Narkoba merupakan salah satu implementasi dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dan sinergitas berbagai pihak, sehingga terwujud keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Satresnarkoba Polres Berau, pada tahun 2022 lalu, berhasil terungkap sebanyak 89 kasus narkoba, di mana 7 kasus di antaranya terjadi di Kelurahan Gunung Panjang. Kemudian, pada rentang Januari-Agustus 2023, berhasil diungkap 48 kasus. Adapun 2 kasus diantaranya terjadi di Kelurahan Gunung Panjang.

Kendati demikian, kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kelurahan Gunung Panjang mengalami penurunan sebesar 71 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, Kampung Bebas Narkoba akhirnya dicanangkan di Kelurahan Gunung Panjang, agar ke depan, wilayah ini benar-benar bebas dan bersih dari narkoba.

“Saya sangat mengharapkan peran aktif dari Polres Berau, dalam hal ini Satresnarkoba, untuk terus memantau dan mendampingi masyarakat Kampung Bebas Narkoba ini. Sehingga ke depan, wilayah ini bukan saja bersih dan bebas dari narkoba, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi kampung/kelurahan yang lain,” kata Sri, Selasa (22/8/2023).

Srijuga mengimbau kepada perangkat Kelurahan Gunung Panjang dan warga masyarakat, agar mendukung penuh proses pencanangan ini dan bersikap kooperatif. Sebab, semua ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan bersama sekaligus mewujudkan sumber daya manusia Berau yang berkualitas cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur.

Kapolres Berau AKBP Steyven Jonly Manopo juga menyampaikan, pembentukan Kampung Bebas Narkoba ini merupakan salah satu bukti keseriusan Polres Berau dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

“Tentunya, kita sebagai aparaturnegara menjalankan sesuai dengan visi Polri untuk menciptakan kondisi

si yang aman dan kondusif. Sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, kasus narkoba di Kabupaten Berau bisa dikatakan meningkat setiap tahun. Adapun 2020 sebanyak 92 kasus, 2021 sebanyak 81 kasus, 2022 sebanyak 89 kasus, dan hingga Agustus 2023 terdapat 48 kasus.

Kendati demikian, dirinya menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melaporkan tindakan yang dianggap mencurigakan ada di sekitar tempat tinggal masing-masing.

“Data dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba di Berau. Tentu saja, hal ini membutuhkan kerjasama dan peran serta untuk memberantas narkoba,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada para pedagang untuk berhenti mengedarkan barang tersebut. Jika ditemukan akan segera ditindak. Apabila dalam penindakan tersebut terjadi perlawanan yang membahayakan petugas, pihaknya akan melakukan penindakan tegas. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



ISTIMEWA

Rutan Tanjung Redeb bersama Polres Berau dan Kodim 0902/BRU musnahkan sejumlah barang sitaan dari WBP.

Rutan Tanjung Redeb Musnahkan Barang Sitaan WBP

TANJUNGREDEB – Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb musnahkan barang bukti hasil razia dengan cara dibakar di area lapangan Rutan Tanjung Redeb, Selasa (22/8/2023).

Pemusnahan tersebut mengangandeng Polres Berau dan Kodim 0902/BRU dengan disaksikan Satuan Operasi Kepatuhan Internal (Satops Patnal). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur.

Kepala Rutan Tanjung Redeb, Puang Dirham menyebut barang yang dimusnahkan yakni ponsel, charger serta headset. Hasil razia selama dua tahun. Terhitung sejak Januari 2021 hingga Agustus 2023.

“Kita musnahkan handphone dan charger serta headset hasil razia selama 2 tahun ini,” katanya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut, Puang menjelaskan bahwa hasil razia dari giat pengeledahan yang sering terlaksana secara rutin dan terjadwal baik secara internal maupun bersama pihak eksternal dari Polres Berau dan Kodim 0902/BRU.

“Tentunya ini hasil dari pengeledahan wisma hunian Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang terlaksana secara rutin dan terjadwal sesuai dengan prosedur Masyarakat yang berlaku,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Re-

habilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Kanwil Kemenkumham Kaltim, Arimin memberikan apresiasi kepada Rutan Tanjung Redeb atas sinergi yang terjalin dengan Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya di wilayah Kabupaten Berau.

“Terkait sinergi, Rutan Tanjung Redeb dengan aparat terkait berjalan dengan baik,” ungkapnya.

“Dengan dukungan dari rekan-rekan TNI/Polri, Rutan Tanjung Redeb mampu menjaga kondusifitas area. Sinergi yang terlaksana sangat baik,” sambungnya. **(mnz/dez)**

Pewartu: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Polres Berau merilis kasus penipuan dan penggelapan mobil rental yang terjadi di Kabupaten Berau.

Pelaku Penggelapan Mobil Rental Diringkus 1 Orang Masuk DPO

TANJUNG REDEB - Polres Berau membekuk pelaku sindikat penggelapan mobil rental di Kabupaten Berau. Dari 3 tersangka, satu orang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Masing-masing berinisial MY, MS dan S. Mereka berhasil membawa kabur dua kendaraan roda empat.

Kapolres Berau, AKBP Steyven Jonly Manopo membeberkan, pengungkapan sindikat penggelapan mobil rental tersebut diketahui setelah adanya laporan dari salah satu pemilik jasa rental mobil yang mengaku mobil miliknya tak kunjung kembali setelah disewa oleh pelaku yang tidak bisa dihubungi. Dari laporan itulah, polisi langsung bergerak dan menangkap para pelaku.

Kejadian tersebut dilaporkan korban pada 14 Agustus lalu. Tersangka MY melakukan modus menyewa mobil rental milik korban pada 4 Agustus. MY mengelabui korban dengan memberikan KTP palsu. Pelaku juga memberikan uang muka sebesar

Rp 1,5 juta untuk membuat pemilik mobil percaya melepaskan mobilnya untuk disewa oleh pelaku.

Kemudian langsung dibawa kabur tanpa sepengetahuan pemilik dan dibawa ke Samarinda untuk dipindahtangankan.

"Setelah berhasil mendapatkan satu mobil, tersangka mencari mobil lain untuk digelapkan dengan modus yang sama pada 8 Agustus," jelasnya, Selasa (22/8/2023).

Menurut pengakuan pelaku sendiri, Dia memperoleh keuntungan sebesar Rp 14 Juta, namun baru dibayarkan Rp 3 Juta.

Diceritakannya, tersangka sendiri berhasil dibekuk di Gang Dimas Jalan Singkuang Kecamatan Tanjung Redeb. Satu tersangka lainnya MS berhasil dibekuk Polres Samarinda. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lain berinisial S.

"Pelaku MS sebagai penerima di Samarinda dan mencari pembeli mobil hasil dari modus rental di Berau

untuk di jual di sana," terangnya.

Selain membekuk pelaku, Polres Berau juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa, 2 unit mobil, 1 buah ponsel, 3 KTP palsu, dan 1 STNK.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terjerat pasal 372 KUHPidana dan 378 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Sejauh ini, kata Dia, baru dua orang yang melaporkan ke Polres terkait penggelapan mobil rental tersebut. Pihaknya mengimbau kepada semua pemilik rental di Berau agar tetap berhati-hati dan mengkonfirmasi identitas penyewa dengan jelas.

"Modus seperti ini sering terjadi, harap selalu berhati-hati. Jangan sampai ini terulang lagi di Berau," imbaunya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Polres Berau merilis kasus peredaran narkoba jenis sabu di Berau.

Polres Berau Amankan 56,89 gram Sabu, 3 Tersangka Dibekuk dan 1 Masih Buron

TANJUNG REDEB - Polres Berau lagi-lagi berhasil menangkap pelaku kasus peredaran narkoba jenis sabu tepat pada 17 Agustus 2023 lalu. Kali ini barang bukti sebanyak 56,89 gram berhasil diamankan.

Wakapolres Berau, Kompol Ranga Abhiyasa didampingi oleh Kasatreskoba, Iptu Didin Nurdin dan PS Kasi Humas, Iptu Suradi mengatakan, bahwa satu orang tersangka berinisial BC dan YS berhasil diamankan dengan Barang Bukti (BB) sabu seberat 0,84 Gram.

"Mendapati laporan masyarakat kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku dan BB," ungkap Kompol

Ranga, Selasa (22/8/23).

Kemudian dilakukan melakukan pengembangan kasus dan pada 18 Agustus di Kecamatan Kelay. Dan berhasil mendapatkan seorang tersangka lagi berinisial TH dengan barang bukti sabu seberat 56,05 Gram. Namun satu tersangka lain masih DPO.

"Total 3 tersangka dengan total barang bukti sebesar 56,89 gram berhasil kami amankan, berikut barang bukti yang lainnya. Dan satu tersangka lagi masih dalam pencarian," tuturnya.

Para tersangka terancam dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun para pelaku yang diamankan rata-rata merupakan pengedar dengan barang bukti berasal dari Kota Samarinda. Diakuinya, pihaknya mesti kerja ekstra dalam memberantas narkoba. Mengingat ada beberapa pintu masuk yang digunakan para pengedar, diantaranya melalui jalur darat, laut hingga udara yang mungkin saja ada.

"Kendala kita karena terlalu banyaknya pintu masuk. Itu yang harus kitaantisipasi," tegasnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Jas Lucky, Tempat Sewa Jas di Balikpapan: Solusi Tampil Keren Tanpa Harus Mahal

BALIKPAPAN - Anggia Mahardika (35), seorang ibu rumah tangga yang kini bertransformasi menjadi pengusaha unik di Balikpapan. Di garasi rumahnya, ia membuka "Jas Lucky", sebuah usaha penyewaan jas yang menjadi pionir di Kota Beriman.

"Awalnya hanya beberapa koleksi suami, baik yang diperoleh dari kantor maupun yang dibeli seken di Jakarta. Saya kemudian berinisiatif untuk membuka jasa penyewaan jas," ungkap Anggia saat ditemui di kediamannya di Perumahan Puri Ratu Kencana, Sepinggian Baru.

Memulai usaha di tengah pandemi pada 2020, Anggia yang sebelumnya berbisnis toko kaos online, memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram @sewa_jas_lucky, untuk mempromosikan Jas Lucky.

Meski di tahun yang penuh tantangan, ia tetap optimis. "Tahun pandemi justru menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan Jas Lucky. Banyak orang aktif di media sosial," tambahnya.

Pasca pandemi, dengan banyaknya acara seperti pernikahan, perpisahan sekolah, dan prom night, permintaan penyewaan jas meningkat. "Awalnya hanya 10 koleksi, kini sudah mencapai 300 koleksi," jelas Anggia.

Jas Lucky menawarkan berbagai pilihan, mulai dari jas casual, semi formal, formal, hingga tuxedo dengan harga mulai dari Rp 100 ribu. Selain jas, ada juga vest, kemeja, dan sepatu fantopel dengan rentang harga Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Semua item disewakan selama 5 hari.

Anggia menekankan bahwa sewa jas adalah solusi bagi mereka yang ingin tampil elegan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. "Membeli setelan jas bisa sangat mahal, dan biasanya hanya digunakan sesekali. Dengan

menyewa, masalah ukuran atau model yang tidak pas bisa dihindari," katanya.

Mengenai nama "Jas Lucky", Anggia menjelaskan bahwa selain berarti "Jas Laki-laki", kata "Lucky" memiliki arti beruntung. "Semoga usaha ini membawa keberuntungan bagi keluarga saya," harapnya.

Anggia berharap Jas Lucky tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat Balikpapan untuk tampil keren tanpa harus mengeluarkan biaya besar, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya. (rls)

Editor: Agus Susanto





Unit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan menangkap seorang pria berinisial AN (27) atas dugaan aksi penggelapan mobil.

Gadaikan Mobil Kredit, Pria di Balikpapan Masuk Bui

BALIKPAPAN - Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskrim Polresta Balikpapan menahan seorang pria berinisial AN (27) atas dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor jaminan fidusia.

Kanit Tipidter Satreskrim Polresta Balikpapan, Iptu Wirawan Trisnadi mengatakan, tersangka AN melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan untuk meraup keuntungan pribadi.

Kasus ini bermula saat tersangka membeli mobil Daihatsu All New Xenia dengan nomor polisi KT 1790 YO dari sistem kredit di sebuah perusahaan pembiayaan di Balikpapan.

"Tersangka awalnya menggunakan mobil tersebut selama kurang

lebih 7 bulan. Pada bulan Juli 2023, tersangka kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain yang diakuinya sebagai keluarga senilai Rp 40 juta," ujarnya, Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut Wirawan Trisnadi menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka uang hasil gadai itu digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Namun karena merasa keberatan dan mengetahui mobil tersebut digadaikan tersangka, perusahaan pembiayaan tersebut melakukan pelaporan terhadap tersangka.

Seperti diketahui, jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,

untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.

"Pelapor di sini merasa jika tersangka telah melanggar perjanjian fidusia tersebut. Makanya dilaporkan," tambahnya.

Atas perbuatan tersangka, pihak pembiayaan mengalami kerugian sebesar Rp 332 juta. Tersangka AN pun dijerat dengan Pasal 36 UURI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Mengalihkan Barang Jaminan Fidusia jo Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Ancaman hukumannya adalah pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta," tutup Wirawan. (bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari




**10
09
2023**

REUNI SMK PERTIWI

Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize

Only
Rp. 50k

Konfirmasi kehadiran : Masnah **081252119669**




BOOKING THS SAJA di Digiroom

BTS

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

**Kode Promo
BTSOLI**

**Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088**

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Urusan Toyota lebih mudah!

*Syarat dan ketentuan berlaku



Fokus Berantas Narkoba, Kutim Launching KBN Desa Singa Gembara

SANGATTA - Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang (Narkoba) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Bupati Ardiansyah Sulaiman melaunching Kampung Bebas Narkoba (KBN) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutim, Selasa (22/8/2023) pagi.

Launching ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Ardiansyah. Dalam acara tersebut turut dihadiri Wabup Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Shodikin, Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Abraham Van Vollen Hoven Ginting, Dandim 0909/KTM yang diwakili Kapten Inf Arif Safardiyatno, Perwakilan Kajari Kutim dan Kepala Desa Singa Gembara Hamriani Kassa.

Pada kesempatan itu, Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa saat ini kita masih berhadapan dengan mereka yang menjadikan narkoba sebagai pemasukan ekonomi (mata pencarian). Kalau memang itu terjadi, maka pemerintah mempunyai

tugas untuk mencari solusi agar mereka bisa sejahtera.

"Salah satu program pemerintah adalah Rp 50 juta per RT. Sebanyak Rp 10 juta digunakan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan di masing-masing RT. Diharapkan yang ikut pelatihan itu adalah warga yang tidak memiliki pekerjaan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa di Kutim akan dibangun Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Salah satu alasannya adalah sebagian besar penghuni Lapas di Bontang merupakan warga Kutim.

"Insyallah tahun depan kita akan mulai bangun Lapas di Sangatta. Lahan dan desainnya sudah ada," ucapnya.

Terakhir, ia juga menyampaikan bahwa di Kutim juga akan dibangun Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang menjadi syarat untuk menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kutim. Ia berharap bangunan tersebut nantinya bisa menjadi salah satu daya dukung dalam rangka memberantas narkoba di Kutim.

Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Ronni Bonic mengatakan bah-

wa kegiatan ini merupakan salah satu program dari pusat. Di mana seluruh jajaran Polres seluruh Indonesia diinstruksikan melaksanakan kegiatan BKN menyambut HUT ke-78 RI.

"Kita di sini harus sepekat dulu bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Karena komitmen dan peran serta kita bersama sangat dibutuhkan dalam memberantas dan memerangi narkoba. Kita berharap jangan sampai masyarakat Kutim ini terutama generasi muda kita rusak akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba," ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Polres Kutim tetap berkomitmen dalam memerangi narkoba. Ini terbukti pada tahun 2023 sampai saat ini, Polres Kutim sudah mengungkap 122 kasus dengan tersangka sebanyak 153 orang. Barang bukti untuk sabu sekitar 1.015 gram dan obat keras sebanyak 4.320 butir.

"Kalau umpamanya 1 gram sabu digunakan oleh 5 orang, maka kami sudah menyelamatkan sebanyak 5.075 orang. Ini bukti keseriusan kami dalam pemberantasan atau memerangi narkoba ini," jelasnya.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa Desa Singa Gembara dijadikan sebagai KBN karena selama 2 tahun terakhir tidak ditemukan kasus terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Kepala Desa Singa Gembara Hamriani Kassa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga acara launching KBN di Desa Singa Gembara bisa terlaksana dengan baik.

"Suatu kebanggaan sekaligus ke-

hormatan yang luar biasa bagi kami karena desa kami ditetapkan sebagai KBN di wilayah Kutim. Ini merupakan suatu amanah dan tantangan bagi kami untuk mengambil andil dalam pemberantasan barang haram tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut, ia berharap program dan kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka. Namun menjadi langkah awal dalam gerakan masyarakat memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

"Semoga kita senantiasa diberikan

kekuatan, kesehatan serta kemudahan sehingga dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan kampung bebas narkoba dan kampung yang benar-benar menjadi percontohan akan nihilnya kasus peredaran serta penyalahgunaan narkoba," harapnya. (rkt)

Penulis : Irfan Aditama

Editor : Nicha Ratnasari

Grand Kartika HOTEL

Paket MAKSIMAL Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

Paket Ber2 Rp **90rb** nett /pax

Paket Ber3 Rp **130rb** nett /pax

FREE Ice Tea

Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

FREE 1 pax comp. Light Meal

www.hotelgrandkartika.com



Peninjauan pembukaan jalan.

Pemkab Buka Akses Harapan Baru-Muara Pasir Pasca Lepas dari Cagar Alam

PASER - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam meningkatkan infrastruktur yang selama ini terhambat akibat status kawasan cagar alam perlahan mulai dibenahi. Terkini, beberapa ruas jalan yang masuk cagar alam, sudah dilakukan perbaikan.

Seperti ruas jalan dari Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro menuju Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot yang kini tengah dibuka setelah Pemkab Paser mendapat persetujuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati Paser, Fahmi Fadli menjelaskan, selama ini tidak ada akses jalan penghubung antar desa sehingga masyarakat setempat terkesan terisolir dan menggunakan alternatif lain untuk dapat mengakses wilayah.

Sehingga pihaknya mengupayakan agar dibukakan akses jalan bagi masyarakat. Adapun pola yang dilakukan, dengan mengajukan usulan ke Kementerian Lingkungan Hid-

up dan Kehutanan (KLHK) RI melalui BKSDA Provinsi Kaltim.

"Kami menemukan pola, untuk membuka akses jalan Air Mati (Desa Harapan Baru) ke Muara Pasir melalui kerja sama yang akan kami jalankan. Tentunya dengan berbagai persyaratan, terkhusus yang akan dikerjakan di kawasan ini," kata Fahmi.

Adapun akses jalan yang dibuka sepanjang 10 kilometer. Kendati sudah mendapat persetujuan, Fahmi menyebut, bukan berarti dapat semerta-merta disusul pembangunan permukiman di kawasan yang berada dalam status cagar alam.

Namun, lanjut Fahmi, untuk jangka panjang dikatakannya akan dilakukan upaya pembebasan kawasan tersebut. Pihaknya berharap, upaya yang dilakukan Pemkab Paser dapat berdampak bagi kebutuhan masyarakat

"Kami berharap masyarakat juga turut serta menjaga, turut melestarikan kawasan CA. Jika sudah kami akan koordinasikan dengan pihak

BKSDA," ujarnya.

Fahmi menambahkan, pada 2023 ini pembangunan jalan dilakukan sepanjang 6 kilometer dahulu. Sementara sisanya, bakal dirampungkan pada 2024 mendatang. Sehingga penyelesaian peningkatan jalan di wilayah tersebut langsung cepat dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi Kaltim, Ari Wibawanto yang juga ikut meninjau pengerjaan dengan dibukanya akses ruas jalan baru itu, dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser, Hasanuddin Meradje mengatakan, pengerjaan pembukaan jalan dengan panjang 6 kilometer menelan anggaran Rp 23,4 miliar. "Kita bakal lanjut lagi pada anggaran 2024 masih ada sekitar 4 sampai 5 kilometer lagi," kata Hasanuddin. (bs)

Penulis : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Ketua BK DPRD Kabupaten Paser, Rahmadi.

22 Petahana Kembali Nyaleg, Ketua BK DPRD Paser Ingatkan Tugas Kelembagaan

PASER - Dari total 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, setidaknya ada 22 orang di antaranya yang dipastikan kembali maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang untuk Kabupaten Paser.

Sementara 8 orang lainnya, dipastikan maju di tingkat provinsi atau memilih untuk tidak maju kembali. Hal itu diketahui, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser merilis Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan sejak Sabtu (19/8/2023) lalu.

Dalam proses tahapan, Ketua KPU Kabupaten Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyatakan, masyarakat dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap DCS yang sudah dilampirkan KPU Kabupaten Paser.

"Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis

disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan," kata Qayyim.

Qayyim mengatakan, tanggapan masyarakat terhadap DCS, penting sebagai masukan bagi KPU Kabupaten Paser sebelum anggota partai politik (parpol) tersebut ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

Pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, jika terdapat bukti yang bisa menggugurkan para bakal calon legislatif (Bacaleg) tersebut sebelum ditetapkan sebagai Caleg pada November 2024 mendatang.

"Setelah diumumkan DCS ini, kami akan umumkan daftar calon tetap pada 3 November mendatang," ujar Qayyim.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Paser, Rahmadi, mengingatkan agar setiap anggota DPRD Kabupaten Paser agar terus menjalankan tugas

kelembagaan hingga masa periode berakhir.

Ia menyebut, di tengah kesibukan tahun politik, anggota DPRD Kabupaten Paser tidak mengesampingkan tugasnya. Sebagai pihak yang memilih untuk tidak kembali nyaleg, Rahmadi berharap masukan tersebut dapat dilaksanakan.

"Yang pasti tidak mengabaikan tugasnya lah. Toh kita masih menjabat sampai Agustus 2024 nanti," ucap politisi Golkar itu.

Untuk diketahui, hingga kini DCS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paser sebanyak 367 orang. Ratusan para Caleg itu diusung oleh 17 Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Paser. **(bs)**

Penulis : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



HUMAS SETKAB PPU FOR MEDIAKALTIMGROUP

Bupati PPU Hamdam dalam rapat pembahasan perjanjian pengalihan PI 10 persen WK Sangasanga dan WK East Kalimantan dan Attaka (EA) di Yogyakarta Selasa (22/8/2023).

Selangkah Lagi, PPU Dapat Participating Interest 10 Persen Blok Eastkal - Attaka

PPU - Ketidakjelasan jatah participating interest (PI) 10 persen atas hasil pengelolaan Wilayah Kerja Eastkal untuk Penajam Paser Utara (PPU) akhirnya ada titik terang. Bupati PPU, Hamdam Pongrewa bahkan menyebutnya "tinggal selangkah lagi" hakyang memang untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas).

Perihal ini terungkap saat rapat pembahasan perjanjian pengalihan PI 10 persen Wilayah Kerja (WK) Sangasanga dan WK East Kalimantan dan Attaka (EA) yang digelar antara PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) di Yogyakarta pada 21-22 Agustus 2023.

Pertemuan ini dihadiri oleh para pemegang saham PT MMP - EA, termasuk Perumda Benuo Taka Energy (BTE) PPU yang diwakili langsung oleh Bupati PPU Hamdam selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Selain itu ada Pemkab Kutai Kartanegara (PT Mahakam Gerbang Raja Migas), Pemkot Bontang (PD Aneka Usaha dan Jasa Bontang), Pemkot Balikpapan melalui Perumda Manuntung Sukses Balikpapan dan dan Perumda Varia Niaga Samarinda.

Usai kegiatan, Hamdam mengaku bersyukur dengan adanya progres

baik PI 10 persen itu. Diketahui berdasarkan hasil pembahasan bersama itu pula, diperkirakan pada September mendatang telah memasuki tahap penandatanganan kesepakatan dengan PT PHKT.

"Alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, PI 10 persen akhirnya kontrak dijadwalkan untuk ditandatangani, bulan depan. Yang jelas, bisa dikatakan satu langkah lagi, InsyaAllah sudah bisa dapat hak kita," katanya.

Pertemuan ini digelar sekaligus merujuk pada Peraturan Menteri ESDM 37/2016 tentang tata cara penawaran PI 10 persen pada wilayah kerja migas. Adapun PI 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor ke pada BUMD setempat.

Serta Keputusan Menteri ESDM tentang pelaksanaan ketentuan penawaran PI 10 persen ke pada BUMD di wilayah kerja migas termasuk di PPU. Sementara itu, Blok Eastkal adalah sumur migas yang ditinggalkan PT Chevron Indonesia Company.

Perusahaan berbendera Amerika Serikat itu tak melanjutkan pengelolaan migas lepas pantai (offshore), setelah masa kontrak kerja sama

dengan Indonesia berakhir 24 Oktober 2018. Pemkab PPU melalui Perumda BTE memiliki saham 18,46 persen pada pengelolaan yang dilakukan PT MMP - EA.

Hamdam menyebutkan perjuangan untuk mendapatkan hak itu cukup panjang dan penuh liku-liku. Bahkan secara resmi sudah dilakukan sejak 2017 lalu.

Salah satu upaya Pemkab PPU, adalah melalui konsorsium bersama empat kabupaten/kota di Kaltim. Masing-masing PPU, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kota Bontang yang leadingnya berada di PT MMP Kaltim.

Tujuan utamanya adalah bagaimana daerah bisa segera memperoleh haknya berupa PI 10 persen dari pengelolaan migas yang ada di wilayah PPU tersebut.

"Saya bersyukur sekali PI 10 persen ini segera terwujud. Mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan di akhir jabatan saya. Walaupun belum sempat keluar hingga akhir jabatan, yang jelas progresnya tinggal selangkah lagi pasti akan terlaksana," tutup Hamdam. (sbk)

Penulis : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



DEDDY/RADARMEDIA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin diwawancarai usai kegiatan.

Hetifah Minta Muatan Lokal Bahasa Daerah di Sekolah Diperkuat Perda

PPU - Keberagaman bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan dan kekuatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaannya mesti dipertahankan dan dilestarikan oleh semua elemen, terkhusus pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hetifah Sjaifudin dalam acara Diskusi Pendidikan pada Selasa (22/8/2023), bertemakan "Implementasi Nilai-nilai karakter kebangsaan sebagai bentuk merdeka belajar".

Hetifah dalam kesempatan ini mengatakan kegiatan ini digelar untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kebangsaannya. Utamanya bagi para siswa maupun guru di dalam kurikulum merdeka.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU (Disdikpora),

guru penggerak serta Kepala sekolah SMA-SMK se-Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

"Jiwa nasionalisme ini bukan hanya saat jadi mahasiswa, baru bicara soal negara dan kebangsaan. Maka dari itu kita mulai memupuk hal ini bukan hanya dari sekolah, melainkan di rumah juga," ujar dia.

Selain itu, lanjut Hetifah, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni juga perlu. Terlebih dalam menghadapi hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dari segi pendidikannya.

Dikatakan, banyaknya bahasa daerah yang juga mulai punah. Serta tenaga pengajar bahasa kedaerahan pun saat ini sangat minim bahkan hampir tidak ada.

"Kita sangat perlu memperkuat pendidikan bahasa daerah bagi PPU dan Paser yang sudah mulai punah.

Yakni dengan memperkuat program sekolah berupa muatan lokal bahasa daerah. Dengan menyekolahkan para pendidik agar mumpuni dalam mengajarkan bahasa daerah tersebut," jelas Hetifah.

Dia juga berharap hal ini menjadi keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) baik PPU maupun Paser. Keterlibatan ini dituangkan melalui peraturan daerah (perda) dalam program pengajaran bahasa daerah.

"Kita akan mendorong pula akan menjadi peraturan di pusat nantinya. Kita inginkan Pemda bisa menuangkan hal ini berupa Perda. Kalau ini sudah bagus dari bawah maka kita akan dorong di pusat juga. Jadi daerah tidak lagi menunggu-nunggu peraturan pusat," tutup Hetifah. (nrd)

Editor : Nicha Ratnasari



PUSDALOPS BPBD PPU FOR MEDIKALTIMGROUP

Para personel saat melakukan pemadaman di dua titik kebakaran di Kecamatan Penajam.

Sehari Dua Kebakaran Terjadi di PPU, Lahan dan Tumpukan Sabut Kelapa Terbakar

PPU - Dalam cuaca panas hari ini, Selasa (22/8/2023), dua titik api muncul dan menyebabkan kebakaran lahan di Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU). Yakni di Kelurahan Pejala dan Kelurahan Gunung Seteleng.

Laporan yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, terjadi di RT 5 Kelurahan Pejala, sekira pukul 13.30 Wita. Tepatnya terjadi pada tumpukan sabut kelapa di sebuah pabrik yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Amanah Masyarakat.

Laporan yang masuk itu langsung ditindaklanjuti oleh tim gabungan yang terkoordinasi dalam Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD PPU. Personel yang terdiri dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Pemadaman (DKPP), Dinas Pertanian (Distan), TNI/Polri serta Satpol-PP PPU langsung menuju lokasi kejadian.

"Setelah tiba di lokasi tim gabungan dibantu masyarakat sekitar langsung melakukan pemadaman dan pendinginan bersama di lokasi,"

ujar Kepala Pelaksana BPBD PPU, Budi Santoso melalui rilis resminya.

Setidaknya 4 armada Damkar Pos Penajam dan Pos Petung serta 1 mobil tandon warga diterjunkan. Kebakaran baru padam sepenuhnya sekira pukul 15.30 Wita, dan menye-

babkan bertumpuk-tumpuk sabut kelapa pra-produkse ludes.

Kejadian kedua terjadi di RT 7 Kelurahan Gunung Seteleng sekira pukul 15.00 Wita. Mengakibatkan lahan, semak belukar dan gambut habis terbakar.



Tim gabungan juga langsung dikerahkan sesaat laporan masuk. Untuk menghentikan kebakaran meluas, setidaknya 6 armada pemadaman diturunkan.

“Pemadaman dilakukan baik dengan cara manual dan menggunakan mesin portable serta menggunakan mobil pemadam,” katanya.

Yaitu dengan menerjuankan 4 unit mobil pemadam DPKP PPU, 1 unit mobil tangki Distan PPU, 1 unit mobil tangki Dinas Perkim. Juga 1 unit me-

sin portable BPBD dan 2 unit mesin portable Distan PPU.

Sekira pukul 19.00 Wita, kebakaran hingga pendinginan lokasi baru berhasil ditakhlukkan. Dari laporan, secara visual saat ini di lokasi kebakaran telah padam dan tidak terdapat potensi timbulnya titik api.

Lebih lanjut, Budi terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam menyikapi cuaca ekstrem kali ini. Khususnya dalam menyikapi kejadian kebaran hutan dan lahan (karhutla)

yang menjadi salah satu potensi paling rawan terjadi di PPU.

“Potensi karhutla pada musim kemarau cukup tinggi. Maka dari itu, dukungan masyarakat untuk segera melaporkan dan untuk tidak beraktivitas yang dapat menimbulkan titik api, sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (sbk)

Penulis : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



BEST TIME TROPHY
DAN UANG PEMBINAAN
TOTAL HADIAH
RATUSAN JUTA RUPIAH



**DANDIM CUP
KEJURPROV
SERI 3
2023**

HADIAH UTAMA
MOTOR MATIC

26-27 AGUSTUS 2023

SIRKUIT EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

DRAG BIKE 201 M (KEJURPROV)

KELAS POINT	KELAS SUPPORTING
1. DB. 1 - BRACKET 8 DETIK	5. DB. 5 - BEBEK 4 TAK TUNE UP 150 CC
2. DB. 2 - BRACKET 9 DETIK	6. DB. 6 - MATIC RANGKA STD INSEKSI 200 CC
3. DB. 3 - BRACKET 10 DETIK	7. DB. 7 - SPORT 4 TAK RANGKA STD NON DOHC 300 CC
4. DB. 4 - SPORT 2 TAK TUNE UP FRAME STD 155 CC (POINT)	8. DB. 8 - MATIC TUNE UP 200 CC
	9. DB. 9 - BEBEK 2 TAK 116 CC
	10. DB. 10 - MATIC RANGKA STD 130 CC (MP7)
	11. DB. 11 - FFA 300 CC
	12. DB. 12 - BEBEK 4 TAK 150 CC
	13. DB. 13 - BEBEK 4 TAK 200 CC
	14. DB. 14 SUNMORI OMR BX KING
	15. DB. 15 SUNMORI BEBEK 2 TAK 116 CC
	16. DB. 16 SUNMORI BEBEK 2 TAK 125 CC NON BUILD UP
	17. DB. 17 SUNMORI BEBEK 2 TAK 150 CC
	18. DB. 18 SUNMORI SPORT 2 TAK 155 CC
	19. DB. 19 SUNMORI MATIC INSEKSI RANGKA STD 160 CC
	20. DB. 20 SUNMORI BEBEK 41T RANGKA STD 160 CC
	21. DB. 21 SUNMORI SPORT 4T 150 CC

DRAG BIKE 402 M

22. DB. 22 BIG MATIC 250 - 400 CC TOURING
23. DB. 23 SPORT 250 - 400 CC TOURING
24. DB. 24 FFA SPORT
25. DB. 25 HARLEY NON TOURING SADDLE BAG
26. DB. 26 HARLEY TOURING SADDLE BAG

REGISTRASI PESERTA

KELAS UTAMA

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 510 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 560 K

KELAS SUPPORTING

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 410 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 460 K

KELAS SUNMORI

TANGGAL 05 - 15 AGUSTUS : 360 K

TANGGAL 16 - 25 AGUSTUS : 410 K

LINK PENDAFTARAN :

HTTPS://LINKTR.EE/
DNTIMINGPENDAFTARAN

PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039

MAULIDANI : +62 857-5134-4384

AYA : +62 831-4400-8571



Diskusi Publik Fisip Unmul, Persiapkan Generasi Muda Kaltim Songsong IKN

SAMARINDA - Menyikapi perubahan besar dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Universitas Mulawarman (Unmul) melalui Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (Himanislik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) menginisiasi diskusi mendalam tentang bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Acara yang bertajuk "Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara" ini berlangsung di Ruang Serbaguna Fisip Unmul, Senin (21/08/2023).

Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, Aka-

demisi Fisip Unmul, menyoroti tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi di era pembangunan IKN. Ia mengungkapkan bahwa meskipun program diploma di Unmul dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, minat terhadap program tersebut menurun drastis. Namun, ia menekankan pentingnya pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda Kaltim.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, ST, memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan SDM lokal. Diantaranya adalah penyediaan sertifikasi kompetensi bagi lu-

lusan SMK dan inisiatif pendidikan advokasi.

Diskusi ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan memotivasi mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Timur untuk bersiap diri dan beradaptasi dengan perubahan yang akan datang dengan pembangunan IKN. Dengan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas, diharapkan Kalimantan Timur dapat memaksimalkan potensi dan peluang yang ditawarkan oleh relokasi ibu kota baru Indonesia. (rls)

Editor: Agus Susanto



Ayo Ramaikan Jalan Sehat HUT Ke-3 Media Kaltim, Berhadiah Sepeda Motor Listrik

SAMARINDA - Masih dalam rangka perayaan hari jadinya yang ke-3, Media Kaltim bakal menggelar Jalan Sehat yang akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2023 mendatang. Ketua Panitia, Adhi Abdhian mengungkapkan, hingga saat ini sudah ratusan peserta yang sudah mendaftar dan siap meramaikan kegiatan spektakuler gelaran Media Kaltim tersebut.

"Ini adalah acara puncak HUT ke-3 Media Kaltim," ujar Ketua Panitia Adhi Abdhian pada Selasa (22/8/2023).

Menariknya, Adhi-sapaan akrabnya, membeberkan bahwa kegiatan ini menyediakan hadiah utama berupa sepeda motor listrik. "Selain hadiah utama sepeda motor listrik, masih banyak lagi hadiah lainnya yang disiapkan untuk peserta. Di antaranya, TV LED, Rice Cooker, dan barang elek-

tronik lainnya," ujar Adhi.

Banyaknya hadiah tersebut tentunya juga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, Ketua KONI Kaltim, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dan juga beberapa perusahaan swasta lainnya. Bagi yang belum mendaftar, pendaftaran peserta jalan sehat masih dibuka.

Cara mendaftarnya pun sangat mudah yakni dengan mengunjungi situs Berita Media Kaltim, maka akan muncul gambar iklan jalan sehat HUT ke-3 Media Kaltim, calon peserta cukup klik gambar tersebut langsung akan diarahkan pada form pendaftaran peserta.

"Peserta bisa mendaftarkan diri, dengan mengisi form dengan mencantumkan biodata asli dan nomor

HP," kata Adhi.

Diketahui, titik Start kegiatan Jalan Sehat ini akan dimulai eks Bandara Temindung dan berakhir Jakan Gatot Subroto. "Jalan sehat akan dimulai pukul 06:00 Wita sampai selesai," tambahnya.

Selanjutnya, usai mengikuti jalan sehat para peserta juga akan diajak senam aerobik massal. "Acara jalan sehat ini adalah olahraga murah dan sangat menyehatkan. Untuk itu kami mengundang semua elemen masyarakat Kaltim dan Samarinda khususnya untuk memeriahkan acara puncak HUT Media Kaltim yang ke-3 ini," pungkas Adhi. **(han)**

Penulis: Hanafi

Editor: Nicha Ratnasari



RAMAIKAN & IKUTI EVENT NYA YUK

ACARA PUNCAK HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

DAFTAR PAKAI KUPON DIGITAL GRATIS

IKUTI JUGA SENAM AEROBIK MASSAL (XEROBIC QUEEN76)

JALAN SEHAT

LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA
MULAI PUKUL 06.00 WITA

DAFTAR JALAN SEHAT GRATIS DISINI

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>

INFORMASI 0853 4894 3982 (Adhi)

